

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sosial merujuk pada permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, bangsa, atau negara. Fenomena ini memiliki berbagai dimensi, sehingga menjadi objek penelitian. Meskipun masalah ini sudah ada sejak lama, belum ada kesepakatan yang jelas mengenai definisi masalah sosial tersebut.¹ Semua orang ingin hidup yang berkecukupan, tetapi tidak terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Namun, masih ada banyak masyarakat di mana sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ketidakmampuan secara ekonomi didefinisikan sebagai individu atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri dan keluarga mereka karena mereka memiliki pendapatan yang rendah sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sendiri. Keadaan-keadaan di atas menunjukkan bahwa seseorang menghadapi masalah kemiskinan.²

Masalah sosial yang semakin kompleks di masyarakat memerlukan upaya dari semua pihak untuk memperbarui dan mengelola sistem sosial serta menyelesaikan masalah sosial tersebut. Pengelolaan sosial adalah tentang bagaimana menggunakan dinamika sosial dalam struktur masyarakat untuk membantu pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Namun, pembaharuan adalah upaya untuk menciptakan nilai-nilai yang melandasi struktur sosial suatu masyarakat yang aktif, stabil, dan berfokus pada mencapai kesejahteraan sosial.

¹ Iis Sudiyati, *Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan Dan Pengemis) Dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedai Di Panti Sosial Bina Karya Penghudi Luhur Bekasi*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015).

² Mirna Tri Pertiwi, *Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Di Kelurahan Sudirmara Jaya* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Intervensi sosial terhadap masalah sosial yang dilakukan secara sadar, kreatif, dan terukur sebagai upaya untuk mengembalikan masalah tersebut ke keadaan normal atau lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dikenal sebagai penyelesaian masalah sosial.³

Pada tahun 2023 jumlah PMKS yang ada di Kota Tangerang yaitu 95.403 orang salah satu diantaranya adalah gelandangan dan pengemis, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan dan menyebabkan kemiskinan saat ini.⁴ Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan termasuk keterbatasan fisik dan mental, pendidikan yang rendah, ketidakmampuan untuk berusaha, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Mereka yang gagal mendapatkan pekerjaan kemudian menjadi pengemis dan gelandangan. Orang-orang yang tersingkir ini kemudian mencoba segala cara untuk tetap hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya, entah apakah mereka menjadi pemulung, pengemis, atau gelandangan.⁵

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu-individu yang terpinggirkan dalam masyarakat dan kerap kali tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang, terutama karena mereka hidup di lingkungan perkotaan yang keras dan tidak ramah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu keluarga, mereka sering terpaksa melakukan hal-hal yang kurang diterima masyarakat. Mereka juga sering dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban dan kebersihan kota. Oleh sebab itu, razia atau penjangkauan bukan lagi hal yang asing bagi mereka. PMKS termasuk kelompok yang paling rentan mengalami kegagalan hidup akibat berbagai faktor seperti masalah ekonomi dan pengabaian dari keluarga. Pemerintah, melalui Dinas Sosial Kota Tangerang,

³ Kenni Juliantara, *Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Membina Masalah Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Tangerang Selatan* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014).

⁴ https://dinsos.tangerangkota.go.id/assets/uploads/informationpublic_20240126_1706253635.pdf

⁵ Iis Sudiyati, *Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan Dan Pengemis) Dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedai Di Panti Sosial Bina Karya Penghudi Luhur Bekasi*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015).

berperan dalam menyelesaikan masalah ini dengan memberikan perlindungan, pembinaan, atau rehabilitasi bagi PMKS.⁶

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya banyak gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan pengamen. Kondisi ini dapat memaksa individu atau kelompok menjadi gelandangan akibat ketidakmampuan memiliki tempat tinggal yang layak, atau menjadikan mengemis sebagai sumber penghidupan. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pasal 27 Ayat 2 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.⁷

Negara Indonesia bertanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang adil untuk melindungi seluruh rakyatnya, menciptakan kesejahteraan dan pendidikan universal, dan memberikan perlindungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang, lembaga pemerintahan yang dikenal sebagai Dinas Sosial menangani dan mengatasi masalah sosial, seperti orang terlantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan sebagainya, yang sangat membutuhkan perlindungan sosial dan kesejahteraannya.⁸ Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

⁶ Faizal Nursamyono, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Di Kota Sukabumi (Upaya Pengadaan Rumah Singgah)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2019).

⁷ Anisya Marsella Putri, *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

⁸ Anisya Marsella Putri, *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁹

Gelandangan adalah individu yang kehidupannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan tidak memiliki pekerjaan, serta mengembara di tempat umum.¹⁰ Sedangkan Pengemis adalah individu yang sering meminta-minta karena ketidakmampuannya untuk mandiri. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengemis adalah seseorang yang mencari belas kasihan orang lain melalui berbagai cara.¹¹ Ada kemungkinan bahwa gelandangan dan pengemis adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka, seperti modal, tempat tinggal, dan lain-lain, sehingga mereka harus menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Kehidupan pengemis dan gelandangan sering berpindah-pindah sesuai dengan sumber yang mereka harapkan untuk hidup, seperti pasar, terminal, dan stasiun.¹²

Karena banyaknya gelandangan pengemis menunjukkan bahwa penanganan mereka belum maksimal, pengambil kebijakan menghadapi tantangan untuk menangani masalah yang kompleks ini. Secara umum, tujuan menangani gelandangan dan pengemis adalah untuk membantu mereka menjadi lebih baik. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Adi bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai

⁹ <https://dinsos.tangerangkota.go.id/assets/uploads/informationpublic_20220217_1645090139.pdf>.

¹⁰ Jarod Ardyasa Kusuma, *Peranan Dinas Sosial Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Sosiologi Masyarakat)*, (Skripsi IAIN, Tulungagung, 2021).

¹¹ Jarod Ardyasa Kusuma, *Peranan Dinas Sosial Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Sosiologi Masyarakat)*, (Skripsi IAIN, Tulungagung, 2021).

¹² Zainal Fardi, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta", (*Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10. No. 1, 2019).

taraf hidup yang lebih baik. Tindakan ini mencakup aspek sosial, mental, dan spriritual selain aspek ekonomi dan fisik.¹³

Pemerintah Kota Tangerang telah mengambil berbagai tindakan untuk melindungi hak-hak anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012. Peraturan ini mengatur bagaimana pemerintah menangani masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut, pemerintah melibatkan Dinas Sosial yang memiliki peran dalam menangani isu-isu terkait anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.¹⁴

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui instansi Dinas Sosial Kota Tangerang yaitu dengan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) dan menyediakan Rumah Singgah, tempat perantara yang sifatnya sementara, sebuah wadah dalam rangka melaksanakan fungsi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Tujuannya untuk tangani atau memberikan perlindungan dan pelayanan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang adalah bukti konkret dari upaya pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan solusi nyata bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, SE, MM, Ak.Ca mengatakan, Rumah Singgah ini berfungsi untuk memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi orang-orang terlantar atau para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan. Orang-orang yang tinggal di dalamnya akan dibantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan membantu mereka untuk memulai

¹³ Maryatun, Santoso Tri Raharjo, Budi Muhammad Taftazani, “Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 13.Nomor 2, 2022).

¹⁴ <https://www.bphn.go.id/data/documents/kotatangerang-2012-5.pdf>

kehidupan yang lebih baik.¹⁵ Selain itu sebelum orang-orang terlantar khususnya gelandangan dan pengemis ini dibawa ke rumah singgah maka penanganan awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan pengecekan administrasi dan kondisi fisik atau psikis oleh petugas tim reaksi cepat (TRC) dan jika orang terlantar atau gelandangan dan pengemis ini benar-benar terlantar dan tidak ada keluarganya dan keadaannya tidak sakit maka akan dibawa langsung ke rumah singgah, kemudian kalo orang terlantar tersebut memang sakit maka tim reaksi cepat akan langsung membawanya ke RSUD yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tangerang, kemudian jika orang terlantar tersebut dalam gangguan jiwa maka petugas akan membawanya sementara ke rumah singgah dan kemudian akan menghubungi pihak rumah sakit jiwa. Setelah itu orang-orang yang berada di rumah singgah khususnya gelandangan dan pengemis ini akan diberikan pelayanan rehabilitasi seperti asesmen untuk mempertemukan klien dengan pihak keluarganya, memberikan tempat tidur dan makan, memberikan pendampingan sosial, dukungan psikologi, bimbingan rohani, bimbingan motivasi dan keterampilan untuk membantu mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dengan demikian peneliti memilih untuk menggunakan teori peran menurut Jim Ife yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis yang menjadikan tolak ukur Dinas Sosial Kota Tangerang untuk mengetahui seberapa berperannya Dinas Sosial Kota Tangerang terhadap penanganan gelandangan dan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi ini dengan judul **“PERAN DINAS SOSIAL KOTA TANGERANG DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DI RUMAH SINGGAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

¹⁵ <https://bantensatu.co/2023/03/01/dinas-sosial-kota-tangerang-terus-optimal-kan-layanan-rumsing-dan-rps/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun rumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kondisi gelandangan dan pengemis di rumah singgah?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam penanganan gelandangan dan pengemis?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanganan gelandangan dan pengemis?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan kondisi gelandangan dan pengemis di rumah singgah.
2. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan, setelah terjawabnya rumusan masalah secara akurat dan masalah penelitian yang dibatasi. Penelitian ini diciptakan dengan harapan hasil penelitian yang nampak, layak memberikan manfaat yang besar secara langsung maupun tidak dan membawa sedikit perubahan. Baik secara teoritis maupun praktis dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan pengetahuan bagi penulis, para pembaca, dan khususnya mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam, yaitu mengenai peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam menangani gelandangan dan pengemis sebagai kelompok yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dari segi praktis, sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman berpikir ilmiah bagi penulis atau peneliti melalui proses penyusunan dan penulisan skripsi. Hal ini akan membantu mereka meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam pengembangan masyarakat Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendukung Dinas Sosial Kota Tangerang dalam memberikan layanan sosial kepada individu yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, termasuk gelandangan dan pengemis.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi akademisi dalam mengembangkan karya ilmiah, baik di kalangan UIN SMH Banten maupun di institusi lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi bagi penulis dalam menyusun penelitian ini, sehingga penulis dapat mengkaji serta memperkaya teori dari setiap penelitian yang telah dilakukan. Dalam kajian terhadap penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan adanya judul yang persis sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah beberapa jurnal terkait yang digunakan penulis sebagai referensi untuk memastikan penelitian ini bebas dari kesamaan dengan penelitian lain.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Sabda Ariyan yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam

Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)” Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan 2020.¹⁶ Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi tersebut adalah Dinas Sosial Kabupaten Asahan telah mengeluarkan program-program khusus dalam penanganan fakir miskin di antaranya: program rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan program sembako, dan bantuan program keluarga harapan. Namun yang menjadi permasalahan pada program ini karena tidak adanya pengawasan dari Dinas Sosial di setiap kecamatan dan Dinas Sosial tidak melakukan pembaharuan data setiap tahunnya sehingga tidak menutup kemungkinan program-program tersebut tidak merata.

Yang menjadi perbedaannya pada skripsi Sabda Ariyan yaitu pada peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan menurut tinjauan fiqih siyasah sedangkan yang peneliti tulis hanya pada peran Dinas Sosial Kota Tangerang tidak menggunakan tinjauan fiqih siyasah. Dan tempat penelitian Dinas Sosial yang peneliti tulis pun sangat jelas berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Irgy Ramadhan yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Di Kota Tangerang Selatan”, Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.¹⁷ Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan untuk penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan, serta mengetahui kebijakan pemerintah serta Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu program penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan hanya

¹⁶ Sabda Ariyan, "*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)*", (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

¹⁷ Irgy Ramadhan, "*Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Di Kota Tangerang Selatan*", (Skripsi UIN Syarif Hiadayatullah Jakarta, 2023).

ada satu program yaitu Program Rehabilitasi Sosial, di dalam kegiatan program tersebut ada dua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, *pertama* layanan data dan kedaruratan yaitu bertujuan melakukan pelayanan data dimana gelandangan dan pengemis ber-KTP Kota Tangerang Selatan dan gelandangan dan pengemis ber-KTP diluar Kota Tangerang Selatan. Pada layanan data dan kedaruratan ini adalah ditunjukann untuk gelandangan dan pengemis yang mempunyai KTP di Kota Tangerang Selatan. Yang *kedua* reunifikasi keluarga yaitu layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Tangerang Selatan tetapi mereka tidak berdomisili atau tidak ber-KTP di Kota Tangerang Selatan. Reunifikasi keluarga ini bertujuan untuk mengembalikan gelandangan dan pengemis ke tempat asal mereka.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam upaya penanganan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan hanya ada dua yang *pertama* layanan data dan kedaruratan, *kedua* reunifikasi atau mempertemukan gelandangan dan pengemis kepada keluarganya. Sedangkan Dinas Sosial Kota Tangerang yang penulis jadikan tempat penelitian yaitu dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan sebelum dibawa ke rumah singgah maka akan ada pengecekan administrasi dan kondisi fisik atau psikis oleh petugas tim reaksi cepat (TRC) dan akan diberikan pelayanan rehabilitasi seperti assesmen untuk mempertemukan klien dengan pihak keluarganya, memberikan tempat tidur dan makan, memberikan pendampingan sosial, dukungan psikologi, bimbingan rohani, dan bimbingan motivasi.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Syahrudin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Rifdan, dengan judul “Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar”, Di Universitas Negeri Makassar (*Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 5, No. 4, November 2021).¹⁸

¹⁸ Rifdan Syahrudin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, "Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar", (*Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5.No. 4, 2021).

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi dan komunikasi melalui teknik observasi, dan wawancara. Kesimpulan dari artikel jurnal tersebut yaitu strategi penanganan anak jalanan di Kota Makassar yang dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan strateginya dengan melakukan patroli, asesmen, pembinaan, pendataan dan pemberian arahan. Adapun hasil dari analisis strategi Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan menunjukkan belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis Dinas Sosial belum mampu menerapkan atau menciptakan terobosan baru dalam penanganan yang baik dan kondusif.

Jika dibandingkan atau dibedakan dengan yang penulis buat, yaitu pada objek penelitian penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial Kota Tangerang melalui rumah singgah. Sedangkan artikel jurnal yang ditulis oleh Syahrudin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Rifdan objek penelitiannya pada penanganan anak jalanan Di Kota Makassar, Walaupun tujuannya sama yaitu untuk “penanganan” namun upaya yang dilakukan dan objek penelitiannya berbeda.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis membuat perbandingan metode strategi, upaya, dan objek penanganan pada masing-masing Dinas Sosial namun itikad serta tujuan penanganan tersebut sama. Oleh karena itu, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari peneliti sebelumnya, penelitian ini masih layak untuk penulis teliti.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mendapatkan hasil yang objektif saat memecahkan kerangka permasalahan, penulis harus menggunakan sejumlah teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memaparkan suatu masalah.

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah komponen status yang terus berubah; ketika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawab mereka

sesuai dengan aturan yang berlaku, mereka menjalankan peran mereka. Setiap orang di dalam sebuah organisasi memiliki cara yang berbeda untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab, atau tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi atau lembaga tersebut.¹⁹

Soerjono Soekanto berpendapat peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) Peranan mencakup aturan yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; dalam hal ini, peranan adalah rangkaian aturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan sosial.
- b) Peranan adalah ide tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat didefinisikan sebagai bagaimana perilaku individu penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun teori Peran menurut Jim Ife yaitu mencakup Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Representasional, dan Peran Teknis berikut penjelasannya sebagai berikut:

- a) Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif adalah peran yang diberikan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, dan menghargai kontribusi dan kerja yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Peran fasilitatif juga menawarkan kesempatan kepada sesama pihak untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Jim Ife peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial,

¹⁹ Joorie M Ruru, Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, "Peran Badan Perencanaan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04.No. 48, 2017).

mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, dan mengorganisasi.²⁰

1) Animasi sosial

Animasi sosial dapat melakukan banyak hal seperti mendorong rasa semangat, memberi inspirasi, dan mendorong orang untuk melakukan sesuatu.

2) Mediasi dan negosiasi

Seringkali, konflik kepentingan dan nilai muncul dalam program pengembangan masyarakat. Saat itulah peran mediator sangat penting untuk membantu menyelesaikan masalah.

3) Pendukung

Karena mereka membutuhkan dukungan dari agen perubahan, orang biasanya tidak percaya diri untuk memaksimalkan kemampuan mereka.

4) Pembangunan konsensus

Kelanjutan dari peran mediasi adalah membangun konsensus, yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan yang ada di masyarakat.

5) Fasilitator kelompok

Peran fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

6) Pemanfaatan sumber daya

Agen perubahan harus memiliki kemampuan untuk menemukan dan menggunakan berbagai sumber daya yang ada di masyarakat.

7) Mengorganisasi

²⁰ Anisya Marsella Putri, *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

Kemampuan agen perubahan untuk mempertimbangkan tindakan yang harus diambil, tindakan yang harus dilakukan secara pribadi, dan prioritas adalah komponen keterampilan organisasi.

b) Peran Edukasi

Peran edukasi adalah posisi dan kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan atau dapat disebut sebagai peran mendidik. Dinas Sosial tidak hanya membantu dalam penetapan agenda untuk meningkatkan produktivitas tetapi juga aktif memberikan masukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bagi individu dan kelompok masyarakat. Meningkatkan kesadaran, penyebaran informasi, dan pelatihan individu, kelompok, dan masyarakat dapat mencapai tujuan pendidikan ini.

c) Peran Representasional

Peran representasi menunjukkan berbagai peran pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain untuk kepentingan masyarakat. Untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat, Dinas Sosial berinteraksi dengan lembaga-lembaga masyarakat. Perolehan sumber daya dari luar, seperti bantuan modal komersial dan pelatihan pengembangan potensial, harus diimbangi dengan hati-hati.

d) Peran Teknis

Peran yang membutuhkan keterampilan atau teknik disebut peran teknis. Ini mengacu pada kemampuan pegawai Dinas Sosial untuk menggunakan komputer, mempresentasikan secara lisan dan tulisan, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menilai kebutuhan untuk mengembangkan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Dinas Sosial dapat melakukan hal ini dengan mengumpulkan informasi dan data dengan individu, kelompok, dan masyarakat. Pemangku kepentingan dapat menarik perhatian untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi pada promosi.

2. Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Penanganan adalah langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu peristiwa, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan atau kerugian pada individu atau masyarakat. Contohnya adalah upaya untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Tangerang. Sementara itu, penanggulangan merujuk pada cara-cara yang diterapkan untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1980, diatur berbagai usaha pemerintah untuk menangani masalah sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan dengan cara yaitu:²¹

a) Usaha Preventif

Pengendalian sosial bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah sosial, seperti pergelandangan dan pengemis. Hal ini dilakukan baik oleh individu maupun kelompok melalui berbagai upaya, seperti penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pendidikan, bantuan, pengawasan, dan pembinaan tambahan. Usaha ini bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis serta membantu mereka dalam kehidupan selanjutnya. Upaya preventif tersebut mencakup: (a) penyuluhan dan bimbingan, (b) pembinaan sosial, (c) pemberian bantuan sosial, (d) peningkatan peluang kerja, (e) penyediaan pemukiman lokal, dan (f) peningkatan kualitas kesehatan.

b) Usaha Represif

Usaha-usaha represif adalah tindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga resmi maupun non-lembaga, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan masalah gelandangan dan pengemis. Usaha ini lebih berfokus pada pemberian tekanan dan pembatasan terhadap

²¹ Luh Putu Sendratari, Mevilia Taryo A.Dewi, I Ketut Margi, "(Pola Penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) Di Kota Singaraja, Buleleng, Bali (Potensi Sebagai Sumber Belajar Sosiologi Di SMA)", (*Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 2.No. 1, 2020).

individu atau kelompok agar tidak kembali mengemis. Beberapa bentuk usaha represif yang sering dilakukan antara lain: (a) razia, (b) penampungan sementara untuk proses seleksi, setelah itu langkah selanjutnya bisa berupa pelepasan dengan syarat tertentu, penempatan di panti sosial, pengembalian kepada keluarga, penyerahan ke pengadilan, atau pemberian layanan kesehatan.

c) Usaha Rehabilitatif

Usaha yang terstruktur ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan dan membantu mengembalikan individu ke lingkungan tempat tinggal atau kampung halaman mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis.

3. Pengertian Gelandangan dan Pengemis

- a) Pengertian "Gelandangan" berasal dari kata "gelandang", yang berarti seseorang yang selalu mengembara atau berkelana. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak, tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, serta makan dan minum di mana saja disebut gelandangan.²²

Namun, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.²³

- b) Karakteristik Gelandangan dan Pengemis

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan karakteristik gelandangan dan pengemis, yaitu:²⁴

²² Dia Meirina Suri, Kebijakan Publik, Sebuah Model Kebijakan Dalam Mengatasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis (PRESS Pekan Baru 2024). Hal 23.

²³ Baktian Nusanto, "Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar In Jember District)", (*Jurnal Politico*, Vol. 17.No 2, 2017).

²⁴ Tamliha Harun, "Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis)", (*Jurnal As Siyasah*, Vol. 3.No. 2, 2018).

1. Karakteristik gelandangan
 - a. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18 dan 59 tahun yang tinggal di mana pun dan hidup mengembara atau menggelandang di lingkungan umum, biasanya di kota-kota besar
 - b. Tidak memiliki tanda pengenalan atau identitas diri, dan berperilaku bebas dan liar, di luar norma masyarakat umum
 - c. Tidak memiliki pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil barang bekas atau makanan, dan lain-lain.
2. Karakteristik pengemis
 - a. Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
 - b. Meminta-minta di rumah penduduk, persimpangan jalan, pasar, tempat ibadah, dan lokasi umum lainnya.
 - c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
 - d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, tinggal bersama orang lain.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang direncanakan dengan terstruktur, sistematis, dan bertujuan tertentu, baik untuk tujuan praktis maupun teoritis.²⁵ Dalam setiap penelitian, metode ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini, beberapa metode yang digunakan antara lain:

²⁵ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Grasindo, 2010), hal.5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang relevan.²⁶ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.²⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

2. Teknik Pemilihan Informan

Dalam pemilihan informan ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk diwawancarai. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini diambil secara tidak irreguler atau acak tetapi sudah ditentukan peneliti berdasarkan ciri-ciri tertentu.²⁸ Dalam hal ini, peneliti sudah memiliki gambaran tentang profil subjek yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam untuk kepentingan penelitian. Adapun jumlah dari keseluruhan yang ada di rumah singgah Dinas Sosial Kota Tangerang ada 10 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 5 informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang dapat memberikan wawasan yang relevan dan mendalam terkait dengan tujuan penelitian. Karena dari ke 5 lainnya yaitu sebagian ODGJ dan lansia yang tidak termasuk ke dalam kriteria informan.

²⁶ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungannya", (*Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol 15. No.1, 2011), 135.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014).

²⁸ Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Universitas Ahmad Dahlan, 2018) hal. 8

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Jl. Iskandar Muda, Bendung, Jl. Pintu Air 10 Jl. Neglasari No.1, RT.001/RW.002, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129, yang menjadi objek penelitian ialah di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Tangerang. Penelitian ini akan dilaksanakan dari Bulan Maret Tahun 2024 sampai Bulan Juni Tahun 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode yang dianggap relevan dan sesuai untuk mendukung penelitian.²⁹ Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan pengamatannya secara langsung dengan menggunakan panca indera, terutama penglihatan, yang didukung oleh indera lainnya. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi terbuka, di mana peneliti secara jelas mengungkapkan kepada sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian.³⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses percakapan yang difokuskan pada suatu masalah. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang persepsi, pikiran, pendapat, dan perasaan orang tentang suatu kasus serta realitas yang terjadi, karena peneliti tidak dapat melakukan observasi secara menyeluruh dan mendapatkan semua informasi yang diperlukan.³¹ Terkait penelitian ini, penulis

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.137.

³⁰ Elen Devira, “*Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penanganan Masalah Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau*” (Skripsi UIN Suska Riau, 2024).

³¹ Bambang Arianto, *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif* (Serang 2024).

menggunakan teknik wawancara semistruktur merupakan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka. Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, kepala atau staff bidang rehabilitasi sosial, perawat rumah singgah atau tim reaksi cepat (TRC), serta beberapa gelandangan dan pengemis.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah bahan yang mencakup memorabilia, korespondensi, audiovisual, serta gambar, yang berupa materi tertulis yang disimpan dan dapat memberikan informasi.³² Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh berupa arsip, kumpulan data tertulis yang bersumber dari buku, jurnal, serta keterangan ilmiah lainnya, dan foto-foto kegiatan yang ada di rumah singgah Dinas Sosial Kota Tangerang.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menghasilkan suatu pemikiran dan pendapat, dengan mengatur hasil, observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam (*findings*) berupa mencari dan menemukan tema, pola, konsep, (*insights dan understanding*), membuat penegasan yang memiliki arti (*statement of meanings*).³³

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis yang memerlukan kepekaan, kecerdasan, dan pemahaman mendalam terhadap hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data yang dikumpulkan dari objek penelitian terkait peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam menangani gelandangan dan pengemis sebagai Penyandang Masalah

³² Bahagia, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh” (Skripsi UIN Ar-raniry, 2020).

³³ Bahagia, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh” (Skripsi UIN Ar-raniry, 2020).

Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan fokus pada studi kasus Rumah Singgah.³⁴

b. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi singkat, tabel, grafik, kartu pita, pictogram, atau lainnya, tetapi biasanya penulis menyajikannya dalam bentuk uraian. Uraian ini mencakup penjelasan mengenai peran Dinas Sosial Kota Tangerang dalam menangani gelandangan dan pengemis sebagai PMKS dalam studi kasus Rumah Singgah.³⁵

c. Verifikasi

Verifikasi mencakup proses menarik kesimpulan dan memeriksa kembali. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang cukup kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi lebih terstruktur, dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi gambaran umum lokasi penelitian, yang mencakup profil Kota Tangerang, profil Dinas Sosial Kota Tangerang, visi dan misi, tujuan,

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian Medan*. Kbm Indonesia Januari 2021, hal. 45.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi, Miked Methods*, Bandung: Alfabta, 2015, hal. 320.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi, Miked Methods*, Bandung: Alfabta, 2015.

sasaran, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Tangerang, serta profil Rumah Singgah.

BAB III membahas kondisi PMKS di Dinas Sosial Kota Tangerang, faktor-faktor penyebab, serta tahapan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial.

BAB IV menguraikan peran Dinas Sosial Kota Tangerang, serta faktor pendukung dan penghambat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Analisis ini dilakukan oleh peneliti dan disajikan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V berisi kesimpulan dan saran.